

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Masalah

Gerakan reformasi tahun 1998 telah menjadi pintu gerbang perubahan dinamika politik dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Gerakan reformasi membuka iklim demokrasi dan politik Indonesia yang sebelumnya tertutup, terkebiri, dan mampet. Euforia masyarakat terjadi dimana-mana sebagai dampak dari kebebasan berekspresi. Masyarakat tidak lagi merasa takut untuk berbicara tentang kebebasan berekspresi yang pada masa rezim orde baru dianggap tabu atau haram. Hal ini barangkali karena hampir selama 32 tahun masa rezim orde baru, bangsa Indonesia dipaksa takut pada politik stabilitas nasional yang membatasi kebebasan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Era baru demokratisasi pascareformasi yang ditandai oleh mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 membawa perubahan cukup signifikan dan mendasar dalam kehidupan demokrasi dan politik di Indonesia. Terjadi pergeseran sistem demokrasi dari sistem otoriter dan tertutup ke arah sistem demokrasi yang berisikan prinsip hak asasi manusia dan kesamaan hak dalam berpolitik. Demokratisasi politik memberikan kebebasan politik untuk menentukan pilihan politiknya. Kondisi ini diapresiasi oleh masyarakat dengan mendirikan berbagai organisasi untuk menyalurkan aspirasi politiknya, baik dalam bentuk partai politik, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan, dan bentuk organisasi lainnya, sehingga tidak mengherankan apabila pascareformasi bermunculan partai politik baru. Partai politik terus bermunculan, terutama saat menjelang pemilihan umum (pemilu).

Seiring telah dibukanya kran kebebasan politik, masyarakat menuntut dilaksanakannya suatu sistem demokrasi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem demokrasi yang benar-benar memberikan kebebasan politik kepada masyarakat, bebas intervensi dan intimidasi pemerintah, serta terciptanya suatu kondisi masyarakat mandani (*civil society*) dalam proses

kehidupan bernegara dan berbangsa. Hal ini didasari oleh adanya ketakutan (*phobia*) masyarakat akan munculnya kembali sistem pemerintahan otoriter yang pernah dijalankan oleh rezim orde lama dan orde baru.

Kehidupan demokrasi di Indonesia yang menjamin hak asasi manusia dan kesamaan hak berpolitik bagi masyarakat hanya dapat diwujudkan apabila sistem politik mampu mengakses partisipasi politik rakyat dalam arti yang sebenarnya. Sistem pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat dengan perantara wakilnya atau badan-badan perwakilan rakyat yang menjalankan kekuasaan pemerintahan senantiasa memperhatikan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Dalam sistem demokrasi, rakyat mempunyai hak yang tidak boleh dihilangkan atau dibatalkan, yaitu hak bersuara dalam arti dapat memilih secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil terhadap wakil-wakilnya. Dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, kekuatan sipil harus bertindak sebagai kontrol terhadap kekuatan rezim pemerintah. Kemunculan partai politik pascareformasi tahun 1998 memberikan bukti nyata dari keinginan rakyat terhadap terciptanya pemerintahan demokratis yang sepenuhnya bisa dikontrol oleh rakyat.

Sementara itu, syarat minimal adanya kehidupan demokrasi dalam sebuah negara adalah pelaksanaan pemilu. Pemilu sebagai instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dimaksudkan guna membentuk pemerintahan yang absah. Pemilu juga sebagai suatu sarana untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Bagi Indonesia, pemilu merupakan salah satu elemen politik nasional yang sangat esensial karena dapat memberikan kesempatan secara penuh kepada rakyat untuk dapat menentukan sendiri wakil-wakilnya (anggota legislatif) dan pemimpin politik yang dianggap layak menjalankan pemerintahan.

Pemilu di Indonesia yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali adalah perwujudan proses pembangunan politik, yaitu suatu peristiwa politik sebagai perwujudan keinginan rakyat untuk mengemukakan aspirasi dan kehendaknya secara umum agar dapat mencapai konsensus politik melalui wakil-wakilnya. Sejak era reformasi tahun 1998, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan

empat kali pemilu, yaitu tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu menjadi tolak ukur kematangan demokrasi Indonesia.

Era demokratisasi pascareformasi pada tahun 1998 telah membuka jalan bagi penguatan demokrasi lokal di Indonesia dalam konteks kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dihasilkan pemerintah pusat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Demokrasi pemerintahan pada *level* lokal (daerah) merupakan ajang pendidikan politik yang relevan bagi rakyat dalam masyarakat demokratis. Sistem pemilu kepada daerah (pemilukada) secara langsung dipilih oleh pemerintah sebagai mekanisme paling tepat dalam penguatan demokrasi lokal sesuai azas desentralisasi dan otonomi daerah.

Sistem pemilukada adalah sejarah baru dalam kehidupan demokrasi di Indonesia dalam rangka penegakan kedaulatan rakyat. Pemilukada merupakan langkah maju dalam proses demokrasi di Indonesia, karena demokrasi telah merambah ke *level* daerah (lokal). Melalui sistem pemilukada, maka rakyat dapat menentukan sendiri pemimpin politik di daerahnya sehingga kepala daerah yang terpilih merupakan cerminan dari suara rakyat. Pemilukada telah menjadi harapan dan sekaligus kesempatan bagi rakyat untuk menentukan arah pemerintahan daerah menuju masa depan lebih baik.

Perubahan sistem pemilukada telah memberikan kesempatan secara penuh kepada rakyat (masyarakat daerah) untuk memilih calon kepala daerah (gubernur dan bupati/walikota) yang dikehendakinya secara langsung tanpa diwakili lagi oleh wakil-wakilnya yang duduk di lembaga legislatif (anggota DPRD). Dalam sistem pemilukada dengan mekanisme pengumpulan suara terbanyak memerlukan upaya persuasif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran rakyat agar berpartisipasi dalam pesta demokrasi politik bernama pemilukada. Hal ini karena partisipasi rakyat dalam menyalurkan hak suara politiknya akan menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah atau setidaknya selama lima tahun ke depan.

Perubahan sistem pemilukada juga merubah cara-cara dan pendekatan kampanye politik/pemilu yang dijalankan masing-masing calon kepala daerah dan partai pendukungnya. Ketika pemilihan kepada daerah dilakukan oleh anggota dewan (DPRD), kampanye pemilu dilakukan melalui lobi-lobi politik

kepada anggota dewan lebih diutamakan. Namun dalam sistem pemilukada, pengenalan calon kepala daerah (kandidat) kepada rakyat dilakukan melalui kampanye pemilu yang melibatkan rakyat dijadikan cara utama untuk menarik perhatian dan suara dari konstituen (pemilih).

Pelaksanaan sistem pemilukada telah munculkan fenomena baru dalam dinamika politik Indonesia, yaitu politik pencitraan melalui proses pemasaran politik (*political marketing*) dimana opini rakyat dibentuk untuk menonjolkan citra (*image*) positif figur kandidat. Disebut sebagai sebuah fenomena baru, karena sebelumnya pencitraan (*branding*) dalam ranah politik (pemilu) tidak populer di Indonesia dan biasanya hanya ditemui dalam aktivitas pemasaran bisnis (komersial). Ketika genderang pemilukada telah ditabuh, calon kepala daerah (kandidat) membentuk tim pemenangan pemilukada (tim sukses). Tim sukses kandidat mulai disibukan merancang strategi pemenangan (pemasaran politik) yang akan diterapkan dalam kampanye pemilu. Beragam cara dan pola dilakukan oleh tim sukses melalui penerapan pemasaran politik dalam strategi kampanye pemilu demi kemenangan kandidat yang diusungnya. Improvisasi pemasaran politik banyak dilakukan oleh tim sukses dengan cara menampilkan visi dan misi, ideologi, tujuan, kebijakan dan program-program, serta figuritas kandidat.

Data Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan kemenangan yang diraih Partai Demokrat pada pemilu presiden tahun 2009 diduga tidak hanya diperoleh sebagai apresiasi rakyat terhadap program kerja yang ditawarkan Partai Demokrat. Kemenangan tersebut ditengarai karena tim sukses Partai Demokrat mengikuti strategi tim sukses Obama yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam kampanyenya. Selain faktor profil dan *image* dari figuritas Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon pemimpin dengan penampilan sabar, cara berbicara, cara berpakaian, kharisma yang terpancar diwajahnya, dan elemen-elemen *image* figuritas yang lain. Karena itu, penting sekali bagi seorang kandidat untuk membangun reputasi positif yang diyakini akan mampu membawa banyak keuntungan bagi organisasi (partai politik) maupun personal (kandidat) (Tintri dkk, 2011:4).

Pada pemilukada Kota Tangerang tahun 2013 diikuti oleh lima pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota. Penetapan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten Nomor: 083/Kpts.KPU-015/Tahun 2013.

Tabel 1. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang

No Urut	Pasangan Calon	Partai Pendukung
1	Harry Mulya Zein-Iskandar	PPP, PKNU, Partai Hanura
2	Abdul Syukur-Helmi Fuad	Partai Golkar, PKS, PKPB, PBB, PPI
3	Dedi S. Gumelar-Suratno Abubakar	PDIP, PAN
4	Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto	Partai Buruh, PPNU, PPRN, PBR, PDS dan 16 partai politik non parlemen
5	Arief R. Wismansyah-Sachrudin	Partai Demokrat, Partai Gerinda, PKB

Sumber: KPU Provinsi Banten, 2013.

Apabila mencermati pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang tersebut, terdapat hal yang sangat menarik pada pemilukada Kota Tangerang tahun 2013. Dari kelima calon Walikota, empat diantaranya adalah calon yang memiliki hubungan langsung dengan Wahidin Halim (Walikota Tangerang periode 2008-2013), sedangkan satu calon lainnya merupakan artis senior dan sekaligus tokoh politik nasional. Calon nomor urut 1: Harry Mulya Zein merupakan Sekretaris Daerah Kota Tangerang, calon nomor urut 2: Abdul Syukur adalah adik kandung Wahidin Halim, calon nomor urut 3: Deddy S. Gumelar lebih akrab dikenal Miing Bagito merupakan artis (pelawak senior) dan sekaligus anggota DPR RI, calon nomor urut 4: Ahmad Marju Kodri adalah Direktur Utama PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang, dan terahir calon nomor urut 5: Arief R. Wismansyah merupakan Wakil Walikota Tangerang periode 2008-2013.

Setelah penetapan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, tahap berikutnya adalah kampanye (promosi) pasangan calon yang dilaksanakan mulai tanggal 14-27 Agustus 2013, diawali dengan kampanye penyampaian visi dan misi di DPRD Kota Tangerang pada tanggal 14 Agustus

2013. Kegiatan kampanye adalah hal yang sangat esensial dan penting dalam pemilukada. Selama masa kampanye pemilu, setiap pasangan calon (kandidat) beserta tim suksesnya akan berusaha memperkenalkan figur kandidat serta memaparkan visi dan misi, ideologi, tujuan, serta rancangan kebijakan dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan apabila terpilih. Namun, dengan terbatasnya waktu kampanye pemilu yang disediakan oleh KPU Provinsi Banten (hanya 14 hari), memaksa setiap kandidat beserta tim suksesnya harus mampu merancang dan merencanakan strategi kampanye pemilu secara tepat dan efektif sehingga dapat menjangkau seluruh masyarakat (pemilih). Setiap kandidat berusaha mensosialisasikan diri (dan atribut yang disandangnya) kepada pemilih, baik sebagai pribadi, bagian dari masyarakat, latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga, dan *track record* koalisi partai politik pengusungnya. Karena itu, penerapan pemasaran politik sebagai sebuah strategi promosi (kampanye pemilu) dalam pemenangan pemilu mutlak diperlukan.

Penerapan komunikasi politik dalam pentas politik, seperti pemilukada menjadi sesuatu yang penting dan tidak dapat ditinggalkan. Pada saat belum ada persaingan kandidat atau situasinya belum begitu sulit maka pemasaran politik belum atau tidak dibutuhkan oleh partai politik dan kandidat. Namun, ketika situasinya banyak saingan atau persaingan kandidat semakin kompetitif, maka pemasaran politik menjadi sangat penting untuk diterapkan. Dengan pemasaran politik, maka partai politik dan kandidat akan mampu merumuskan target pasar sasaran kampanye yang diinginkan dan fokus dalam membidik targetnya. Selain itu, pemasaran politik akan mendukung proses penciptaan strategi komunikasi politik antara partai politik dan kandidat dengan karakter pemilih yang menjadi target sarannya. Artinya, penerapan pemasaran politik bukanlah konsep menjual partai politik dan kandidat, melainkan menawarkan bagaimana membuat program yang berhubungan dengan permasalahan aktual dalam masyarakat.

Penerapan konsep komunikasi dalam ranah politik menyebabkan politik akan menjadi lebih demokratis, membawa peningkatan kuantitas dan kualitas informasi yang mengalir dari pemilih ke kandidat, sehingga kandidat

lebih sensitif dan responsif terhadap kebutuhan pemilih. Hal ini akan meningkatkan saluran komunikasi dari kandidat untuk pemilih. Pemasaran politik berperan untuk membiasakan diri bagi partai politik dan kandidat maupun konstituen dalam bersaing secara sehat dan terbuka. Penerapan pemasaran politik diyakini akan dapat meningkatkan ikatan rasional maupun emosional antara kandidat dengan para pendukungnya. Serangkaian aktivitas pemasaran politik membuat hubungan antara kandidat dengan pemilih menjadi lebih intens.

Melihat pentingnya peran komunikasi politik dalam pemilu membuat pasangan calon (kandidat) berlomba-lomba untuk mengkreasikan konsep komunikasi politik sebagai kunci sukses dalam pemenangan pemilukada. Fokus penerapan konsep pemasaran politik adalah terletak pada kebutuhan pemilih. Kebutuhan pemilih inilah yang menjadi fokus perhatian dalam pembinaan hubungan antara partai politik dan kandidat dengan para pemilihnya. Namun, penerapan konsep pemasaran politik dalam sebuah strategi promosi pasangan calon dalam pemilukada oleh masing-masing tim sukses kandidat Walikota Tangerang berbeda-beda. Tim sukses promosi (kampanye) pemilukada yang dibentuk oleh partai politik dan kandidat merancang dan merencanakan sebuah strategi pemasaran politik yang akan dilakukan dalam kampanye pemilukada Kota Tangerang tahun 2013 agar mendapatkan simpati dan dukungan sebanyak mungkin dari para pemilih untuk memenangkan arena pertarungan dalam pemilukada.

Dengan berakhirnya masa kampanye pemilukada Kota Tangerang pada tanggal 27 Agustus 2013, maka tahapan berikutnya adalah pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2013. Masyarakat sebagai pemilih yang telah menerima berbagai stimulus pemasaran politik dari partai politik dan kandidat selama masa kampanye pemilu akhirnya menentukan pilihan politiknya dengan mencoblos salah satu kandidat di tempat pemungutan suara. Rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilukada Kota Tangerang tahun 2013 menetapkan kemenangan diraih oleh pasangan nomor urut 5, yaitu Arief R. Wismansyah-Sachrudin (selanjutnya dalam pemaparan tulisan ini disebut Arief-Sachrudin) yang diusung oleh Partai Demokrat, PKB, dan Partai

Gerinda. Hal ini didasarkan pada Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor: 0104/Kpts.KPU-015/ Tahun 2013.

Tabel 2. Perolehan Suara pada Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013

No Urut	Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase
1	Harry Mulya Zein-Iskandar	45,627	6.43
2	Abdul Syukur-Helmi Fuad	187,003	26.34
3	Dedi Gumelar-Suratno	121,375	17.10
4	Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto	15,058	2.12
5	Arief R. Wismansyah-Sachrudin	340,810	48.01
Total		709,873	100.00

Sumber: KPU Provinsi Banten, 2013.

Kemenangan Arief R. Wismansyah pada pemilukada Kota Tangerang tahun 2013 menjadi kajian yang menarik karena sebagai Wakil Walikota Tangerang, Arief R. Wismansyah harus berhadapan dengan Partai Golkar yang mengusung Abdul Syukur (adik kandung Walikota Tangerang Wahidin Halim) sebagai calon Walikota Tangerang. Selain itu, Arief R. Wismansyah dan Partai Demokrat harus menerima kenyataan pahit ketika Wahidin Halim yang pada saat itu masih menjabat sebagai Walikota Tangerang dan sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, semula mendukung Arief R. Wismansyah akhirnya secara terang-terangan berbalik arah memberikan dukungan kepada adik kandungnya (Abdul Syukur) yang diusung oleh Partai Golkar.

Permasalahan yang dihadapi pasangan Arief-Sachrudin untuk dapat mengikuti Pemilukada Kota Tangerang tahun 2013 tidak hanya disitu saja. Peristiwa mengejutkan terjadi ketika secara sepihak KPU Kota Tangerang pada tanggal 24 Juli 2013 tidak meloloskan pasangan Arief-Sachrudin dengan alasan surat pengunduran diri dan tidak aktif dalam jabatan sebagai pegawai negeri sipil tidak memenuhi persyaratan. Keputusan sepihak dari KPU Kota Tangerang tersebut ditanggapi secara serius oleh pasangan Arief-Sachrudin dengan melaporkannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilu (DKPP). Berdasarkan Keputusan DKPP RI Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013, DKPP menyatakan KPU Kota Tangerang terbukti melanggar kode etik dan memberikan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara kepada empat anggota KPU Kota Tangerang. Selain itu, DKPP memutuskan untuk mengembalikan hak konstitusi kepada pasangan Arief-Sachrudin dan memerintahkan kepada KPU Provinsi Banten untuk mengambil alih proses penyelenggaraan pemilukada Kota Tangerang tahun 2013.

Permasalahan pemilukada Kota Tangerang tahun 2013 masih berlanjut ketika pasangan Harry Mulya Zein-Iskandar dan pasangan Abdul Syukur-Hilmi Fuad mengajukan gugatan sengketa pemilukada terhadap kemenangan pasangan Arief-Sachrudin ke Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah menunggu hampir dua bulan, akhirnya pasangan Arief-Sachrudin sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tangerang terpilih dapat bernafas lega. Pasalnya, dalam sidang putusan sengketa pemilukada Kota Tangerang yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2013, amar putusan MK menolak permohonan pemohon dan memerintahkan kepada KPU Provinsi Banten untuk menetapkan pasangan nomor urut 5: Arief-Sachrudin sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang terpilih dalam pemilukada Kota Tangerang tahun 2013. Menindaklanjuti amar putusan MK tersebut, KPU Provinsi Banten kemudian menetapkan pasangan nomor urut 5: Arief-Sachrudin sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tangerang terpilih. Hal ini didasarkan pada Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 124/Kpts/KPU. Prov-015/Tahun 2013.

Berangkat dari hasil pelaksanaan pemilukada Kota Tangerang tahun 2013 yang menetapkan kemenangan diraih oleh pasangan Arief-Sachrudin, ada beberapa kondisi yang irasional dari sosok seorang Arief R Wismansyah yang membuatnya terpilih sebagai Walikota Tangerang. Pertama, posisi Arief sebagai orang terzalimi dalam konflik dengan Walikota Tangerang (Wahidin Halim). Penzaliman yang dilakukan Wahidin Halim terhadap Arief dimulai dari tidak didukungnya Arief oleh Wahidin Halim, padahal keduanya sama-sama kader Partai Demokrat. Wahidin Halim lebih memilih mendukung calon dari Partai Golkar sekaligus adik kandungnya, Abdul Syukur. Kemudian yang kedua, peristiwa pemutusan kontrak kerja sama antara Pemerintah Kota

(Pemkot) Tangerang dan jaringan RS Sari Asih yang merupakan RS milik keluarga Arief. Wahidin Halim beralasan, Pemkot Tangerang mencabut kontrak tersebut karena sudah tidak mampu lagi melakukan pembayaran. Selanjutnya faktor ketiga adalah sempat tidak diloloskannya nama Arief oleh KPU Kota Tangerang. Keputusan KPU Kota Tangerang itu dibuat sebab tandemnya, Sachrudin yang menjabat Camat Pinang, tidak mendapat surat izin dari atasannya. Atasan sang camat dalam hal ini adalah Wahidin Halim yang melarang Sachrudin ikut pemilukada

Kondisi irasional tersebut di atas mendorong peneliti untuk melakukan kajian atau penelitian tentang kajian kompetensi walikota terpilih pada pemilukada kota tangerang tahun 2013. Kemenangan pasangan Arief-Sachrudin menarik untuk dikaji atau diteliti karena diperoleh melalui proses yang tidak mudah dengan segala permasalahannya. Dalam penyelenggaraan pemilukada Kota Tangerang tahun 2013 penuh dengan berbagai konflik dan permasalahan, dimulai dari penetapan pasangan calon, pengambilalihan penyelenggaraan pemilukada oleh KPU Provinsi Banten, hingga pengajuan gugatan sengketa pemilukada ke MK. Keberhasilan Arief R. Wismansyah sekarang menjadi Walikota Tangerang menjadi alasan utama peneliti untuk mengkaji lebih lanjut mengenai strategi kemenangan Arief R. Wismansyah. Sebagai sosok (*brand image*) pengusaha muda yang sukses, Arief R. Wismansyah menerapkan kesuksesannya di bidang pemerintahan. Dalam kurun waktu satu tahun (2014 s.d 2015), sudah terlihat keberhasilannya dalam pembangunan Kota Tangerang. Hal ini terlihat dari peningkatan peran serta pelaku dunia usaha dalam mendukung usahanya untuk membangun Kota Tangerang. Program Kartu Sehat bagi warga Kota Tangerang berjalan dengan sukses berkat dukungan pelaku dunia usaha di bidang kesehatan. Selain itu, gejala demonstrasi di Kota Tangerang berkurang dengan adanya sosok Arief R. Wismansyah sebagai Walikota Tangerang.

Terlepas dari berbagai permasalahan di atas, hasil Survey Lembaga Survey Indonesia (LSI) 2013 menunjukkan bahwa Miing dan Arief R Wismansyah paling populer diantara kandidat yang lain, tetapi Arief R Wismansyah lebih disukai oleh warga yang mengenalnya, dan kemungkinan

terpilih (efek popularitas) Arief R Wismansyah menduduki peringkat tertinggi. Arief R Wismansyah lebih disukai warganya karena memiliki nilai jual (kompetensi) di masyarakat yaitu pengalaman di birokrasi, pintar (intelektual), pengusaha muda yang sukses, dekat pada rakyat, serta jujur dan bersih KKN. Kompetensi Arief R. Wismansyah tersebut merupakan keunggulan yang menjadi daya saing dalam memasuki pertarungan pada pemilukada Kota Tangerang tahun 2013.

Berbagai alasan yang telah diuraikan tersebut memberikan dorongan peneliti untuk melakukan penelitian. Judul yang sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas adalah : “Kajian Kompetensi Walikota Terpilih pada Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013”.

## **I.2 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti memberi batasan masalah penelitian ini hanya tentang bagaimana kompetensi Arief R. Wismansyah berdasarkan persepsi publik dan bagaimana kajian kompetensi pasangan Arief-Sachrudin yang dilakukan oleh Tim Garuda dalam pemenangan pemilukada Kota Tangerang tahun 2013. Analisis komunikasi politik dilakukan dengan menggunakan model 9P elemen komunikasi politik atau yang dikenal dengan istilah meliputi: *positioning, policy, person, party, presentation, push marketing, pull marketing, pass marketing*, dan *polling*, sedangkan analisis figur kandidat berdasarkan unsur kompetensi yang dimiliki yaitu *knowledge, Skill dan attitude*.

## **I.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah, peneliti merumuskan masalah utama yang ingin diangkat sebagai kajian penelitian ini adalah bagaimana kajian kompetensi dalam strategi kemenangan pemenangan pasangan Arief-Sachrudin yang dilakukan Tim Garuda dalam pemilukada Kota Tangerang tahun 2013? Secara terinci rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi publik terhadap kompetensi Arief R. Wismansyah sebagai Walikota terpilih ?

2. Bagaimana Kajian Kompetensi pasangan Arief-Sachrudin yang dilakukan oleh Tim Garuda pada pemilukada Kota Tangerang tahun 2013 ?

#### **I.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan utama penelitian ini adalah mengkaji kompetensi walikota terpilih pada pemilukada kota tangerang tahun 2013. Secara terinci tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh persepsi publik terhadap kompetensi Arief R. Wisnansyah sebagai Walikota terpilih dilihat dari kompetensinya.
2. Untuk memperoleh deskripsi kompetensi pasangan Arief-Sachrudin yang dilakukan oleh Tim Garuda dalam pemilukada Kota Tangerang tahun 2013.

#### **I.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini dapat dipilah menjadi dua, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Memberi kontribusi pada pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, artinya dapat memperkuat telaah tentang konsep pemasaran, khususnya pemasaran politik sehingga menambah dan memperluas pengetahuan dan wawasan dengan memahami lebih mendalam tentang faktor-faktor yang diteliti serta dapat mengaplikasikan dari ilmu yang telah dipelajari ke praktik terapan.
- b. Menjadi sumber informasi dan tambahan referensi bagi almamater dan peneliti berikutnya yang diperlukan sebagai bahan perbandingan untuk membantu dalam melakukan penelitian selanjutnya, khususnya berkaitan dengan penerapan pemasaran politik dalam pemilu.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini sebagai masukan atau sumbangan pemikiran yang dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi pihak-pihak berkepentingan dalam proses pemilukada, KPU dan KPUD , partai politik, pasangan calon (kandidat) kepala daerah, tim sukses pasangan calon kepala daerah, maupun

para praktisi tentang betapa pentingnya penerapan strategi pemenangan dalam kampanye pemilu.

